



SIARAN PERS Untuk Segera Diberitakan

Diskusi Meja Bundar di Kapal Statsraad Lehmkuhl “Menuju Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”

Jakarta- Senin, 7 November 2022- Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia bekerja sama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyelenggarakan diskusi meja bundar mengenai ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Diskusi ini diadakan di atas kapal layar tinggi Norwegia, *Statsraad Lehmkuhl*, yang mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 6 sampai 9 November 2022 sebagai rangkaian dari Ekspedisi Satu Samudera atau *One Ocean Expedition*. Materi bahasan diskusi berfokus pada dua dari lima bidang yang merupakan area kunci transformasi menuju ekonomi kelautan yang berkelanjutan, yaitu kesehatan laut dan keadilan laut (tiga lainnya adalah kekayaan laut, pengetahuan laut, dan pembiayaan laut). Perwakilan dari institusi pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat turut hadir dan memaparkan pandangan mereka tentang kemajuan, pelbagai program yang sudah ada, dan pertimbangan kunci untuk meningkatkan transformasi pada kesehatan laut dan keadilan laut di Indonesia.

Diskusi meja bundar dimulai dengan sambutan pembukaan dari Yang Terhormat Rut Krüger Giverin, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia. Dubes Rut menekankan peran penting Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim melalui pengelolaan kesehatan laut. Kemudian, Dubes Rut menjelaskan lebih lanjut bahwa alih-alih memilih antara perlindungan laut dan produksi laut, High Level Panel for Sustainable Ocean Economy (*Panel Kelautan/the Ocean Panel*) berfokus pada proses atau cara-cara yang dapat dilakukan agar dapat mencapai ekonomi kelautan dengan produksi yang berkelanjutan. Pengelolaan kelautan yang berkelanjutan penting karena dapat memberikan banyak manfaat, seperti menciptakan lapangan kerja, bisnis yang berkelanjutan, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada laut dan pesisir.

Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar telah membuat komitmen serius tentang perlindungan kesehatan laut melalui tindakan mengatasi pencemaran plastik di laut. Pada sambutan pembukaannya, Radian Nurcahyo, Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemkomarves), menyoroti komitmen dan tindakan nasional yang telah diambil untuk mengatasi pencemaran plastik di laut. Komitmen dan tindakan nasional yang disampaikan, di antaranya adalah komitmen untuk mengurangi 30% limbah padat dan 70% sampah plastik di laut per tahun 2025. Komitmen yang disampaikan ini telah diejawantahkan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional. Sementara itu, untuk



mengurangi kebocoran yang terjadi di laut, seperti sampah plastik yang dibuang dari kegiatan pelayaran dan perikanan, Indonesia mendukung Proyek Kemitraan GloLitter.

Dengan terus menurunnya kondisi kesehatan laut dunia, kerangka ekonomi biru yang diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) didasarkan pada solusi untuk kesehatan laut. Anastasia Kuswardani, Kepala Unit Pelaksana Tim Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, menjelaskan lima program yang menjadi bagian dari kerangka ekonomi biru: (1) Perluasan Kawasan Konservasi Laut (KKL); (2) Kebijakan Perikanan Terukur/Kegiatan Penangkapan Ikan Berbasis Kuota; (3) Pengembangan Budidaya Perikanan Berkelanjutan; (4) Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (5) Pengelolaan Sampah Plastik termasuk Program Bulan Cinta Laut yang dilaksanakan pada bulan Oktober di seluruh perairan Indonesia. Akan tetapi, Dr. Anastasia mengungkapkan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi dalam proses pembuatan kebijakan, salah satunya adalah kurangnya ketersediaan data yang akurat dan keterbatasan kapasitas pemantauan.

Merespon pemaparan Dr. Anastasia, perwakilan Bank Dunia Ambroise Brenier menjelaskan peran Bank Dunia dalam mendukung usaha Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi ekonomi kelautan, di antaranya berupa kolaborasi budidaya rumput laut, reformasi perikanan berbasis kuota dan pengumpulan data melalui Program “LAUTRA” (Lautan Sejahtera). Selanjutnya, Meizani Irmadhiany, selaku Direktur Eksekutif Konservasi Indonesia, menyoroti pentingnya data dasar dan penilaian terhadap kesehatan laut dalam pembentukan kebijakan internasional dan regional, termasuk penyusunan skema pembiayaan untuk laut. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa perluasan KKL di Indonesia seharusnya tidak hanya memperhatikan perlindungan ekosistem terumbu karang dan wilayah pesisir, tetapi juga memperhatikan penyusunan rancangan KKL untuk resiliensi spesies serta keberlanjutan stok pangan dan perikanan yang optimal. Sementara itu, Aristyo R. Dharmawan, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menanggapi permasalahan sampah plastik di laut. Ia menyatakan perlunya suatu kebijakan maritime yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan bidang maritim yang kompleks. Kemudian, ia juga menekankan bahwa penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) harus menggunakan pendekatan komprehensif melalui pengelolaan kapal domestik, salah satunya dengan penerapan isi perjanjian internasional *Port State Measure Agreement* (PSMA). Adapun Safran Yusri, Ketua Yayasan Terangi, menekankan urgensi untuk melindungi terumbu karang sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim karena merupakan salah satu ekosistem yang paling rentan terhadap peningkatan suhu.

Beralih ke pembahasan mengenai keadilan laut, yang berfokus pada aspek keadilan terhadap akses dan kendali atas manfaat ekosistem. Dr. Mas Achmad Santosa, Chief Executive Officer IOJI, menjelaskan keadilan laut dalam ekonomi kelautan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui penerapan prinsip “Tiga P” yang diperkenalkan oleh Panel Kelautan, yaitu perlindungan yang efektif (*Protection*), produksi yang berkelanjutan (*Production*), dan kemakmuran yang



berkeadilan (*Prosperity*). Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai temuan atas ketidakadilan dan tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir, di antaranya perebutan ruang laut, degradasi jasa lingkungan dan ekosistem, ketidakadilan tenurial, dan ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi. Oleh karena itu, solusi untuk dapat mencapai keadilan laut adalah melalui beberapa tindakan, yaitu pengakuan hak *procedural, recognitional, dan distributional* bagi masyarakat yang bergantung pada laut, pengarusutamaan tiga tatanan tata kelola yang terintegrasi, dan memasukkan keberlanjutan yang kuat dalam tata kelola laut.

Valerie Julliand, Resident Coordinator UN Indonesia, dalam menanggapi pernyataan Dr. Mas Achmad Santosa, menekankan pentingnya peralihan pandangan tentang keadilan laut yang sebelumnya terpusat pada kepentingan manusia menjadi juga memasukkan pentingnya melestarikan alam dan membela hak-hak alam sebagai bagian dari prinsip dan nilai yang terkandung dalam keadilan laut. Selanjutnya, Firdaus Agung Kunto Kurniawan dari KKP menyatakan bahwa KKL perlu dikelola secara berkeadilan dan berkesinambungan, yaitu dengan memperhatikan pemerataan pembagian manfaat, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Kemudian, Rayhan Dudayev dari Yayasan Pesisir Lestari menjelaskan cara KKL berbasis masyarakat melalui Tindakan Konservasi Efektif Lainnya yang dapat dioptimalkan untuk mencapai 30% target Kawasan Konservasi Laut pada tahun 2030, dan urgensi untuk mengakui pengetahuan lokal dalam kerangka peraturan. Sementara itu, Wiro Wirandi dari Konservasi Laut Biru mengemukakan pentingnya pendidikan, informasi, dan akses bagi nelayan skala kecil. Maka, masyarakat pesisir dan nelayan kecil perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi mulai dari tingkat mikro.

Keterangan untuk Editor

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Yang Terhormat Ibu Rut Krüger Giverin, dan CEO IOJI, Bapak Dr. Mas Achmad Santosa, bersedia untuk wawancara dengan media.

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Karenina Lasrindy (081316883471 / kareninal@oceanjusticeinitiative.org)

Masdian Diasto (0878-8922-0154 / masdian.diasto@mfa.no)

About IOJI

The Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) is a think-tank and policy advocacy institution that supports Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, to realize marine governance based on the principles of effective protection, sustainable use, and equitable welfare. IOJI builds collaborations with state and non-state actors to influence decision-making processes at national, regional and international levels by providing various scientific evidence-based policy proposals. IOJI also conducts assistance and



Norwegian Embassy
Jakarta



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

empowerment work for communities whose livelihoods depend on the sea, such as small fishermen, coastal communities and migrant fisherman workers, in defending and fighting for their basic rights.

Tentang IOJI

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) adalah lembaga think-tank dan advokasi kebijakan yang mendukung negara Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk mewujudkan tata kelola kelautan dengan berlandaskan prinsip perlindungan yang efektif, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang berkeadilan. IOJI membangun kolaborasi dengan aktor negara dan non negara untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional dan internasional dengan menyediakan berbagai usulan kebijakan berbasis bukti ilmiah. IOJI juga melakukan kerja pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang hidupnya bergantung pada laut, seperti nelayan kecil, masyarakat pesisir dan pekerja migran pelaut perikanan, dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka.